

**PERAN *FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION* TERHADAP
PENGUNGSUR SURIAH DI TURKI PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

HIDAYAT

18323037

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**PERAN *FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION* TERHADAP
PENGUNGSY SURIAH DI TURKI PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

HIDAYAT

18323037

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN *FOOD AND AGRICULTURE ORGANISATION* TERHADAP PENGUNGSI SURIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Dewan Penguji

1. Mohamad Rezky Utama, S.IP.,M.Si.
2. Hasbi Aswar, S.IP., MA., Ph.D.
3. Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.IP.,MA.

Tanda Tangan

HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Surat Pernyataan Integritas Akademik

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayat
Tempat dan Tanggal Lahir : Bahomoteffe, 25-06-1998
Alamat : Bahomoteffe
NIM : 18323037
Program Studi : Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa seluruh karya akademik yang saya hasilkan selama melaksanakan perkuliahan di Program Studi Hubungan Internasional adalah karya saya sendiri yang dikerjakan secara jujur dan independen dengan:

1. Tidak menggunakan jasa pihak ketiga (joki) dalam pengerjaan karya akademik atau menjadi pihak ketiga dalam pengerjaan karya akademik mahasiswa lain. Semua kontribusi yang telah diberikan oleh pihak lain dalam penulisan karya akademik saya telah sesuai dengan aturan dan tercantum dengan benar.
2. Tidak melakukan plagiasi yang berupa pengakuan atas hasil karya akademik orang lain. Segala gagasan atau data yang didapatkan dari karya atau pemikiran orang lain telah melalui proses parafrase dan dicantumkan pada sitasi.
3. Tidak melakukan manipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau perangkat lunak otomatis lainnya untuk pengerjaan hal substansial dalam penulisan karya akademik.

Apabila di masa mendatang setelah kelulusan saya, ditemukan informasi yang membuktikan bahwa salah satu atau sebagian karya akademik saya tidak merupakan hasil kerja saya sendiri dan/atau merupakan pelanggaran atas pernyataan saya di atas, saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai dengan regulasi yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 22 Agustus 2025



HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamīn.

Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

Ayah dan Ibu tercinta.

Untuk Ayah dan Ibu, setiap langkahku hingga hari ini bukanlah sebuah akhir, melainkan jejak dari doa dan pengorbanan yang kalian titipkan dalam perjalanan ini. Pada setiap lembar kertas dalam skripsi ini tersimpan tetes peluh, doa tulus, serta kasih sayang yang senantiasa mengiringiku. Izinkan aku menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga atas doa, dukungan, nasihat, dan cinta yang kalian curahkan, hingga akhirnya aku dapat mempersembahkan secuil hasil dari perjuanganku ini untuk kalian.

HALAMAN MOTTO

"A man who doesn't spend time with his family can never be a real man."

— *Don Vito Corleone, The Godfather* —

*"Tetaplah semangat, kobarkan api pantang menyerah, selesaikanlah yang telah
kau mulai jangan putus asa!"*

— *Alhamda Bachzan* —

KATA PENGANTAR



Assalāmu‘alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh

Alhamdulillahirabbil‘ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhānahu Wa Ta‘ālā atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallāhu ‘Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhānahu Wa Ta‘ālā atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya.
2. Ayah dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta dukungan moril dan materil yang tiada henti.
3. Bapak Prof. Dr.rer. soc. Masduki, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Budaya UII.
4. Ibu Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional UII.
5. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP.,M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan.

6. Bapak Mohammad Rezky Utama, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi.
7. Seluruh dosen dan staf Program Studi Hubungan Internasional UII atas ilmu, arahan, dan bantuan yang telah diberikan selama masa studi.
8. Rekan-rekan, sahabat, serta keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas doa, dukungan, kebersamaan, dan semangat yang selalu menguatkan penulis hingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Yogyakarta, 29 Agustus 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hidayat', is written over a light grey rectangular background.

Hidayat

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	III
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
HALAMAN MOTTO	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR SINGKATAN	XI
ABSTRAK	XII
ABSTRACT	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	6
1.3 TUJUAN PENELITIAN	6
1.4 CAKUPAN PENELITIAN	7
1.5 TINJAUAN PUSTAKA	7
1.6 KERANGKA PEMIKIRAN	10
1.7 ARGUMEN SEMENTARA	12
1.8 METODE PENELITIAN	13
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	13
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	13
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	13
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	14
1.9 SISTEMATIKA PEMBAHASAN	14
BAB 2 KONFLIK SURIAH DAN FAO	15
2.1 FAO SEBAGAI AKTOR	15
2.2 FAO: LATAR BELAKANG DAN RUANG LINGKUP	16
2.3 KORELASI ANTARA FAO DAN COVID-19	17
2.4 KONFLIK SURIAH DAN DAMPAK TERHADAP SEKTOR PANGAN	22
BAB 3 APLIKASI TEORI PERAN TERHADAP FAO TERHADAP PENGUNGSUR SURIAH DI TURKI AKIBAT DARI KONFLIK SURIAH ...	28
3.1 URGENSI FAO DI TURKI MASA COVID-19	28
3.2 INSTRUMEN FAO DALAM MENANGANI KRISIS	37
3.3 ARENA OPERASIONAL FAO	40
3.4 PENGAMBILAN KEPUTUSAN FAO	42

BAB 4 PENUTUP	45
4.1 KESIMPULAN.....	45
4.2 REKOMENDASI	46
DAFTAR PUSTAKA	48

DAFTAR SINGKATAN

FAO	: Food and Agriculture Organization
FSA	: Food Security Analysis / Farm Service Agency
SNC	: Sector National Committee / Syrian National Coalition
SNCORF	: Syrian National Coalition Of Revolutionary and Opposition Forces
UNHCR	: United Nations High Commissioner for Refugees
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
UE	: Union Eropa
TAC	: Total Allowable Catch
WFP	: World Food Programme
AFAD	: African Foreign Affairs Directorate / African Fund for Agricultural Development
WHO	: World Health Organization
WFC	: World Food Council / World Fishing Center
EMOP	: Emergency Operation
GFA	: General Funding Agreement
OI	: Organisasi Internasional
IGO	: Inter-Governmental Organization
INGO	: International Non-Governmental Organization
OCHA Affairs	: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
ECOSOC	: Economic and Social Council
FRP	: Financial Recovery Plan / Food Response Plan
ELRP	: Emergency Livelihoods and Recovery Programme
WTO	: World Trade Organization
NIIS	: National Interoperable Identification System
ESSA	: Every Student Succeeds Act
OHCHR	: Office of the High Commissioner for Human Rights
SOHR	: Syrian Observatory for Human Rights
IDP	: Internally Displaced Person
SRRP	: Syria Regional Refugee Response Plan
FFS	: Field Farming Schools / Feelings Focused Support
CSA/GAP	: Climate Smart Agriculture / Good Agricultural Practices
ASDP	: Agricultural Sector Development Programme
GIZ	: Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
IPASH	: International Public Administration Services Hub
ESSN	: Emergency Social Safety Net
3RP	: Regional Refugee and Resilience Plan
UNDP	: United Nations Development Programme
NATO	: North Atlantic Treaty Organization

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran FAO terhadap pengungsi Suriah di Turki dengan menggunakan teori peran organisasi internasional dari Clive Archer. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menyoroti bagaimana kompleksitas dan dinamika konflik Suriah telah berdampak besar terhadap warga Suriah. Akibat dari konflik, banyak warga negara Suriah mencari jalur aman untuk menyelamatkan diri, termasuk pergi dan mengungsi ke Turki. Dibandingkan negara Asia atau negara Timur Tengah lainnya, Turki menjadi negara dengan penerima pengungsi Suriah terbanyak. Hampir lebih dari 3.5 juta orang setiap tahun. Kehadiran Covid-19 di akhir tahun 2019 juga berdampak pada akses pangan. Ini menarik perhatian untuk melihat peran dari *Food and Agriculture Organisation* (FAO) dalam membuat jangka pendek maupun jangka panjang terhadap pengungsi Suriah di Turki. Melalui hasil analisis, peneliti menemukan bahwa FAO berperan dalam mengakomodasi keperluan dari pengungsi Suriah di masa Covid-19. Untuk mencapai tujuan, FAO bekerja sama dengan pemerintah Turki hingga organisasi sipil.

Kata-kata kunci: FAO, Pengungsi Suriah, Turki

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of FAO towards Syrian refugees in Türkiye using Clive Archer's theory of the role of international organizations. Using qualitative methods, this research highlights how the complexity and dynamics of the Syrian conflict have had a major impact on Syrian citizens. As a result of the conflict, many Syrian citizens are looking for safe routes to escape, including leaving and fleeing to Türkiye. Compared to other Asian countries or Middle Eastern countries, Türkiye is the country that receives the most Syrian refugees. Almost more than 3.5 million people live here every year. The presence of Covid-19 at the end of 2019 also had an impact on food access. It is interesting to see the role of the Food and Agriculture Organization (FAO) in making short-term and long-term impacts on Syrian refugees in Türkiye. Through the results of the analysis, researchers found that FAO played a role in the accommodation of Syrian refugees during the Covid-19 period. To achieve its goals, FAO collaborates with the Turkish government and civil organizations.

Keywords: *FAO, Syrian Refuge, Turkey*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan peran Food and Agriculture Organization (FAO) terhadap pengungsi Suriah di Turki pada masa pandemi Covid-19. Terdapat beberapa alasan topik penelitian ini digunakan. Pertama, letak geografis Turki yang strategis dengan Suriah. Kedua, eskalasi konflik di Suriah berdampak pada pergerakan pengungsi ke Turki. Ketiga, kemunculan Covid-19 di akhir 2019 berdampak terhadap pengungsi Suriah di Turki. Keempat, posisi dan peran FAO yang signifikan dalam menanggulangi dan mengakomodir kebutuhan pengungsi Suriah di Turki.

Kawasan Timur Tengah seperti konflik Suriah menimbulkan instabilitas politik dan sosial. Akibat kebijakan Bashar al-Assad, muncul aktor-aktor radikal maupun eksternal yang menentang atau menjadi oposisi terhadap kebijakan tersebut. Hal ini yang memperkeruh konflik Suriah. Terdapat beberapa pandangan yang menjelaskan mengenai kemunculan atau kausal dari konflik Suriah. Pertama, konflik Suriah didasari oleh permasalahan ekonomi, mulai dari jumlah pengangguran yang tinggi, harga pokok mengalami inflasi, hak politik terbatas, hingga aparat keamanan yang represif (Starr 2012).

Kedua, di tahun 2011, selama *Arab Springs*, terjadi keinginan untuk melakukan reformasi terhadap politik Suriah. Bashar dianggap sebagai pemimpin yang tidak amanah dan tidak transparan. Lebih daripada itu, keluarga al-Assad telah memimpin Suriah sejak 1970 (W.Leshch 2005). Bukan mengalami pertumbuhan ekonomi dan maju di kalangan negara Timur Tengah, Suriah justru

masih termasuk negara berkembang. Namun, pandangan ini ditentang oleh beberapa kalangan akademisi, Jose, misalnya.

Dalam pandangan Jose, demokrasi bukan menjadi penyebab utama dari konflik Suriah, melainkan Suriah kuat secara militer dan intelijen serta selalu menerapkan sikap kontra terhadap Israel. Maka daripada itu, terdapat banyak aktor-aktor di konflik Suriah yang tentu menjadi tantangan. Beberapa aktor yang dimaksud seperti kelompok pemberontak Suriah antara lain *Free Syrian Army* (FSA), *Syrian National Council* (SNC) dan *Syrian National Council for Opposition and Revolutionary Forces* (SNCORF) (Munif 2020). Namun, di lain hal terdapat kelompok oposisi anti-kekerasan, anti-sektarianisme, dan anti-intervensi asing, yaitu *National Coordination Body for Democratic Change*.

Akibat dari perang tersebut, Turki menjadi bagian yang ikut menampung pengungsi Suriah dikarenakan kedekatan geografi. Menurut laporan *United Nations High Commissioner for Refugee* (UNHCR) di tahun 2016 mengungkapkan bahwa Turki telah menerima 2,6 juta pengungsi Suriah (Rofii 2021). Angka ini menjadi yang terbesar jika dibandingkan Lebanon dan Yordania. Dalam konteks ini, Turki memiliki peran sentral di kawasan. Namun, Turki bukan negara tujuan atau destinasi akhir bagi pengungsi, melainkan hanya negara transit, sehingga para pengungsi tersebut dapat dipindahkan di Eropa.

Sama halnya dengan Jerman, Turki adalah salah satu negara yang menerapkan *open door policy* di tahun 2011, bagi para pengungsi di seluruh dunia, terutama pengungsi asal Suriah (Rofii 2021) (Agestia, Aruni and Walangara Nau 2023). Dengan intensitas jumlah pengungsi yang besar, hal ini menjadikan negara ini menjadi titik kritis bagi kehidupan diaspora warga Suriah untuk tahun-tahun

mendatang. Maka daripada itu, dengan kehadiran pengungsi memberikan tekanan atau tantangan bagi sumber daya, infrastruktur dan pelayanan sosial. Terdapat beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Turki seperti mendirikan kamp pengungsi, meningkatkan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang kerja, hingga bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Kebijakan Turki untuk membuka pintu perbatasan bagi pengungsi Suriah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor: ekonomi, militer, politik, letak geografis, dan hubungan bilateral antar negara. Alasan-alasan itulah yang membuat Turki melanjutkan *open door policy*, memperbanyak membangun kamp pengungsi, memberikan status kewarganegaraan, bekerja sama dengan lembaga internasional, dan memberikan insentif dana kepada pengungsi Suriah. Pada dasarnya, kebijakan pintu terbuka sejalan dengan kebijakan luar negeri yang dianut oleh Turki, yaitu *'Peace at Home, Peace in The World, dan Zero Problem with Neighbors'* (Amiruddin 2021). Bahkan alokasi anggaran yang diberikan oleh Turki kepada para pengungsi sangat besar. Namun, apa yang dilakukan oleh Turki kurang mendapat apresiasi dari dunia internasional terutama organisasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan kawasan Uni Eropa (UE).

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) melaporkan jumlah pengungsi Suriah sepanjang tahun 2011-2018 mencapai 5 juta yang tersebar di enam negara yaitu Turki, Lebanon, Yordania, Irak, Mesir dan Afrika Selatan (Christophersen 2020). Hal ini menyebabkan permasalahan demi permasalahan dihadapi oleh para pengungsi Suriah di kamp-kamp pengungsian, salah satunya krisis pangan. Kemiskinan menyebabkan asupan makanan yang diterima oleh para pengungsi secara kualitas dan kuantitas tidak sesuai. Hal ini

menyebabkan anak-anak yang dalam masa pertumbuhan mengalami masalah kesehatan seperti kurang gizi kronis yang mempengaruhi 24% anak-anak di bawah usia lima tahun yang tinggal di luar TAC (FAO 2020). Untuk mengatasi masalah tersebut, *World Food Program* (WFP) yang merupakan salah satu organisasi pangan dunia melakukan dua cara dalam menangani masalah pangan yang dihadapi oleh para pengungsi, yaitu *e-food card and emergency social safety net* (WFP 2024).

Sebagian besar pengungsi Suriah di Turki adalah pengungsi yang tinggal di luar kamp. Memastikan keamanan pangan bagi pengungsi yang tinggal di luar kamp telah menjadi salah satu masalah terbesar (WFP 2024). Selain masalah ketahanan pangan, para pengungsi sering kali dianggap dapat mengancam keamanan nasional dan internasional karena kawasan pengungsian mereka disebut sebagai tempat tanpa aturan hukum, mampu menghadirkan lingkungan yang menguntungkan bagi organisasi fundamentalis, nasionalis, maupun teroris (Hinnebusch 2018). Meskipun Turki memberikan bantuan kepada pengungsi dalam bentuk tunai selama tahun-tahun awal krisis dan makanan per hari, terjadi peningkatan pengeluaran eksponensial. Dalam hal ini, *Disaster and Emergency Management Authority* pemerintah Turki atau yang dikenal dengan AFAD, menuntut organisasi internasional untuk menyediakan dana dalam jumlah yang lebih tinggi.

Terdapat peran dari organisasi internasional seperti FAO yang membuat program dalam membantu pemerintah Turki. FAO telah bekerja, misalnya, di konflik Suriah dalam memberikan penyuluhan terhadap para korban perang. Melalui hasil tinjauan *the United Nations Resident and Humanitarian*

Coordinator pada Agustus 2011, memberikan FAO tugas dalam menerapkan *Emergency Operation*, seperti memberikan bantuan makanan selama konflik berlangsung. FAO juga menerapkan beberapa program esensial seperti *technical cooperation project, emergency operation*, hingga *emergency food assistance*.

Pada pertengahan tahun 2020, pandemi Covid-19 menimbulkan disrupsi besar terhadap berbagai sektor esensial di tingkat global, termasuk sektor pangan, kesehatan, dan ekonomi. Bagi kelompok pengungsi, khususnya pengungsi Suriah, dampak ini jauh lebih berat karena mereka sudah berada dalam kondisi rentan sejak sebelum pandemi. Pembatasan mobilitas akibat *lockdown* mengakibatkan banyak pengungsi kehilangan pekerjaan informal yang menjadi sumber utama penghidupan mereka. Studi lapangan menunjukkan bahwa setelah Maret 2020 tingkat pengangguran pengungsi Suriah meningkat drastis dari 18% menjadi 88%, sementara 63% rumah tangga pengungsi mengalami kesulitan dalam mengakses pangan dan kebutuhan dasar (NCBI, 2020). Di sisi lain, harga pangan di Turki mengalami kenaikan rata-rata 15–20% pada tahun 2020, memperparah kerentanan kelompok pengungsi (FAO, 2021).

Laporan Palang Merah Turki mencatat sekitar 4 juta pengungsi Suriah terdampak secara langsung oleh kombinasi risiko kesehatan akibat virus dan kerentanan ekonomi (IFRC, 2020). Selain itu, program *Emergency Social Safety Net (ESSN)* yang didanai Uni Eropa menjadi penopang utama bagi 1,7 juta pengungsi dengan bantuan tunai bulanan, namun tetap belum mencukupi kebutuhan dasar secara penuh (WFP, 2021). Pandemi juga memperburuk masalah sosial, termasuk meningkatnya sentimen xenofobia terhadap pengungsi di Turki. Survei publik tahun 2019 menunjukkan bahwa 83,2% warga mendukung

pemulangan pengungsi, dan kondisi pandemi memperkuat pandangan negatif tersebut (Wikipedia, 2025).

Situasi ini memperlihatkan bahwa pandemi tidak hanya bersifat krisis kesehatan, tetapi juga krisis sosial-ekonomi dan politik. Dalam konteks penelitian ini, peran Food and Agriculture Organization (FAO) menjadi relevan, mengingat mandatnya dalam memperkuat ketahanan pangan, mendorong sistem pertanian berkelanjutan, dan memberikan intervensi darurat berupa bantuan pangan serta dukungan penghidupan. Upaya FAO diharapkan mampu mereduksi dampak negatif pandemi sekaligus menciptakan kondisi pemulihan yang lebih berkelanjutan bagi pengungsi Suriah.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran *Food and Agriculture* (FAO) terhadap pengungsi Suriah di Turki di masa pandemi Covid-19 tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah menjelaskan peran Food and Agriculture Organization (FAO) terhadap pengungsi Suriah di Turki pada masa pandemi Covid-19. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana FAO berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan, memberikan bantuan darurat, dan mendukung penghidupan pengungsi yang terdampak krisis. Selain itu, penelitian ini menelaah sinergi FAO dengan pemerintah Turki serta organisasi internasional lainnya, sehingga memperlihatkan posisi FAO sebagai aktor penting dalam penanganan pengungsi di tengah pandemi.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini berfokus terhadap peran FAO dalam membuat program terhadap pengungsi Suriah di Turki. Turki merupakan negara penerima pengungsi Suriah terbanyak dibandingkan negara kawasan Timur Tengah lainnya sehingga, perlu ada program tambahan dari organisasi eksternal untuk membantu pemerintah Turki dalam mengakomodasi pengungsi Suriah; FAO salah satunya. Peran keberlanjutan FAO di Suriah maupun di Turki telah berdampak terhadap pengungsi Suriah, seperti memberikan kebutuhan pangan.

Penelitian ini menguraikan hasil penelitian dengan mencermati peran FAO di Turki semasa Covid-19. Dalam keadaan kritis, FAO telah berperan besar dalam membuat program-program kemanusiaan ketika perdagangan dunia dan suplai global terhambat. Menurut Wakil Presiden dari *the Global Food Banking Network*, Douglas L. O'brien menyatakan bahwa pandemi berpeluang menyebabkan krisis kelaparan global. *World Health Organisation* (WHO) melaporkan hal yang serupa bahwa sekitar 94% *food bank* di seluruh dunia mengalami kekurangan pasokan yang mana 85% di antaranya membutuhkan dukungan dana dan logistik.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai FAO telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Dalam studi literatur tersebut akan melibatkan beberapa karya-karya penelitian yang berdasarkan, secara besar, melalui artikel jurnal. Berdasarkan studi kasus dan judul, maka peneliti akan menggunakan dua variabel sebagai parameter studi literatur, yaitu peran FAO dan pengungsi Suriah.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Jamaan dan Nasution dengan judul, “Peran *Food And Agriculture Organization* (FAO) Dalam Mengatasi Krisis Pangan di Bangladesh Tahun 2007-2012.” Studi Nasution memperlihatkan bahwa terjadi krisis di Bangladesh sekitar tahun 2005 yang menyebabkan penduduk menjadi miskin (Jamaan and Nasution 2015). Berdasarkan data dari Nasution, penduduk miskin Bangladesh sekitar 30-40%. Dikomparasikan dengan Pakistan, maka hampir setengah dari penduduk yang mengalami krisis pangan tahun 2007-2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FAO berhasil mengatasi krisis pangan di Bangladesh dan mampu menjalankan fungsinya. Keberhasilan yang dicapai berupa: peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan inisiatif saat menghadapi kembali krisis pangan di masa mendatang (Jamaan and Nasution 2015).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Prastio (2014) dengan judul, “Peran *Food And Agriculture Organization* (FAO) dalam Membantu Krisis Pangan di Afghanistan (2007-2011).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa FAO baru membantu Afghanistan sebesar 70% saja. Kekurangan FAO disebabkan oleh banyaknya kendala di lapangan yaitu tidak maksimalnya dana yang diberikan dari negara donatur. Kebanyakan dana digunakan untuk membayar para konsultan dan biaya tentara perang yang mencapai \$250.000 sampai \$500.000 per tahun (Tjarsono and Prastio 2014).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Putri (2021) dengan judul, “Peran *Food and Agriculture Organization* (FAO) dalam Menangani Krisis Pangan di Suriah.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa FAO bersama WFC bekerjasama melakukan *Emergency Operation* dalam mengatasi krisis pangan kronis yang

terjadi di Suriah (Putri 2021). Kebijakan tersebut membuat WFP berhasil mencapai 97 % atau sekitar 3,7 juta orang tiap bulannya sebagai penerima bantuan pangan di Suriah dan 1,5 juta pengungsi tiap bulannya di negara tetangga . Program *e-card* di daerah pengungsi juga telah menguntungkan perekonomian lokal negara tetangga hingga US\$3 miliar. Namun dalam melaksanakan programnya, WFP menghadapi berbagai hambatan yaitu masalah keamanan jalur dan kurangnya dana untuk memenuhi seluruh target penerima bantuan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Putra (2024) tentang, “Peran Liputan Media *World Food Programme* (WFP) Dalam Menangani Krisis Pangan yang terjadi di Suriah.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa WFP sebagai organisasi internasional dalam menangani krisis pangan di Suriah memiliki peran sebagai instrumen, arena dan aktor independen. Peran ini terlihat dalam implementasi program WFP di Suriah selama rentang tahun 2018-2020. Program utama WFP adalah operasi darurat (EMOP), bantuan dan pemulihan operasi (PRRO), dan operasi khusus (SO). Selama 2018 hingga 2020, peran WFP sebagai instrumen terlihat pada saat diberikannya *General Food Assistance* (GFA). Perannya sebagai arena tidak terlalu terlihat di 2019 dan 2020 karena karena munculnya Covid-19. Sementara itu, peran WFP sebagai aktor independen hanya terlihat pada tahun 2020 dengan perubahan prosedur operasional dalam melaksanakan program-programnya yang harus mematuhi peraturan kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid – 19 (Putra, et al. 2024).

Berdasarkan studi yang telah diuraikan, penelitian mengenai peran FAO penting untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama di era Covid-19, untuk menunjukkan peran keberlanjutan dari FAO. Semua studi di atas memiliki beberapa

kekurangan. Pertama, meskipun telah menjelaskan studi mengenai FAO dan pengungsi Suriah, penelitian di atas tidak menjelaskan secara kerangka konseptual mengenai arti pengungsi. Kedua, beberapa penelitian masih terhenti di tahun 2018. Dalam artian, tidak memperlihatkan signifikansi ataupun keberlanjutan peran FAO di masa Covid-19. Ketiga, beberapa penelitian belum berfokus kepada Turki sebagai negara Asia yang menerima pengungsi Suriah. Maka daripada itu, penelitian ini akan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan teori peran organisasi internasional dari Clive Archer. Terdapat beberapa alasan esensial mengenai korelasi antara studi kasus dan teori peran. Pertama, teori tersebut berfokus terhadap Organisasi Internasional (OI) sebagai subjek utama dari hubungan internasional. Kedua, Archer menguraikan peran dari OI secara sistematis dan terukur, sehingga kompatibel dengan studi kasus.

Clive Archer membuat studi yang berjudul “International Organisations.” Melalui studi tersebut, Archer menjelaskan bahwa OI adalah bentuk formal yang didasari oleh kesepakatan anggota yang dari negara maupun non-negara. Ini dilakukan untuk menunjukkan dan meraih kepentingan bersama (Archer 2001, 30-34). Berdasarkan pengertian dari Archer, maka terdapat beberapa klasifikasi OI.

Pertama, OI adalah instrumen yang berisikan anggota untuk mencapai tujuan tertentu. Negara anggotanya menggunakan organisasi internasional sebagai alat untuk kebijakannya, yang digunakan dalam diplomasi negara untuk

mencapai kesepakatan, menghindari atau mengurangi intensitas konflik, dan sering kali berfungsi untuk memperkuat kepentingan nasional negara tersebut. Jika ini terjadi, organisasi internasional kemungkinan besar akan diperebutkan oleh negara-negara yang paling kuat yang ingin memanfaatkannya. Akibatnya, peluang untuk bertindak secara independen menjadi terbatas. Archer menjelaskan bahwa negara yang memiliki dominasi kekuatan dalam organisasi internasional mungkin menggunakannya sebagai instrumen diplomasi. Namun, hal ini tidak selalu terjadi karena organisasi internasional yang sehat bekerja sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani oleh seluruh negara anggotanya tanpa dominasi suatu negara (Archer 2001, 68-70) .

Kedua, sebagai arena, atau tempat kegiatan, organisasi internasional menyediakan tempat bagi anggotanya untuk berkumpul, berdebat, bekerja sama, merumuskan, dan memprakarsai pembentukan perjanjian internasional. Organisasi internasional juga menyediakan tempat yang lebih terbuka bagi anggotanya untuk mengemukakan pendapat mereka dan mengetahui perspektif orang lain melalui forum umum (Archer 2001, 73-77).

Ketiga, organisasi internasional dapat membuat keputusan sendiri sebagai aktor independen tanpa dipengaruhi oleh kekuatan atau tekanan dari luar organisasi. Archer menyatakan bahwa sebagian besar organisasi internasional bergantung pada keberadaan negara anggotanya; ini terutama berlaku untuk organisasi internasional pemerintahan (IGO), seperti PBB. Namun, organisasi internasional non pemerintahan (INGO) banyak yang memiliki identitas yang kuat, menunjukkan bahwa organisasi internasional tersebut lebih kuat daripada negara anggotanya,

bahkan di antara mereka yang memiliki peran yang efektif di dunia internasional (Archer 2001, 79-80).

Melalui studi kasus ini, teori Archer diimplementasikan dengan menggunakan variabel aktor. Variabel aktor diperlukan dengan maksud untuk menjelaskan program dan kebijakan yang diimplementasikan oleh FAO terhadap pengungsi yang ada di Turki. Namun, penelitian ini tidak menggunakan variabel arena karena menurut laman dari FAO, program dari pengungsi di Turki “tidak masuk prioritas.” Hal ini dikarenakan lebih mengutamakan negara-negara yang sedang berkonflik seperti Suriah itu sendiri, dan beberapa negara bagian Afrika lainnya. Maka daripada itu, FAO lebih menggunakan otoritas untuk merespons langsung dan bekerja sama dengan negara anggota lain, organisasi lainnya, dan pemerintah Turki.

1.7 Argumen Sementara

FAO memiliki peran vital dalam mendukung pengungsi Suriah di Turki, khususnya pada masa pandemi Covid-19. Peran tersebut dijalankan melalui sejumlah instrumen, seperti program bantuan pangan darurat, pelatihan keterampilan pertanian, serta dukungan khusus bagi kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak. Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya jangka pendek dalam mengatasi krisis pangan, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan pengungsi.

Implementasi program FAO berlangsung dalam berbagai arena, yakni arena internasional melalui mandat sebagai badan PBB yang menangani isu pangan global, arena nasional melalui kemitraan dengan pemerintah Turki dalam kebijakan

pengungsi, serta arena lokal melalui pelaksanaan program di kamp dan komunitas perkotaan tempat pengungsi bermukim.

Proses pengambilan keputusan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah Turki, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga internasional seperti UNHCR dan WFP. Keputusan tersebut meliputi identifikasi kebutuhan mendesak, penetapan kelompok sasaran prioritas, hingga penentuan mekanisme distribusi yang sesuai dengan kondisi pandemi. Dengan demikian, analisis atas instrumen, arena, dan proses pengambilan keputusan memperlihatkan bagaimana FAO menjalankan peran strategisnya dalam merespons krisis pengungsi Suriah di Turki pada masa pandemi.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini berupa kualitatif yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menganalisis suatu fenomena secara mendalam. Dalam penelitian ini, ada lima tahapan dalam penelitian kualitatif diantaranya mengangkat permasalahan, memunculkan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data yang relevan, melakukan analisis data, dan menjawab pertanyaan penelitian.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah peran FAO dari penelitian ini mencakup pada pengungsi Suriah.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian ini berfokus terhadap teknik pengumpulan data berbasis kepustakaan (*library research*) atau metode pustaka. Sumber data pustaka diakses melalui buku, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, dan artikel baik yang dijadikan sebagai data primer yang bersumber dari media cetak maupun elektronik.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan beberapa tahapan. Pertama, penelitian melakukan proses pengumpulan data secara terstruktur dan sistematis. Kedua, peneliti menggunakan beberapa literatur yang telah dipilih untuk mendapatkan informasi yang relevan terhadap studi kasus. Informasi yang didapatkan melalui buku, jurnal artikel, dan artikel media massa.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memiliki empat bab utama. Bab Pertama mengenai pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab Kedua membahas mengenai sejarah dan ruang lingkup dari FAO dan juga respons FAO terhadap Covid-19. Bab Ketiga, peneliti menganalisis studi kasus dengan menggunakan teori Archer yang melibatkan beragam program FAO di Turki kepada pengungsi Suriah. Bab Keempat berisikan tentang kesimpulan dari uraian pembahasan mengenai peran FAO terhadap pengungsi Suriah di Turki di masa pandemi Covid-19. Selain itu, peneliti juga akan memberikan saran kepada penelitian selanjutnya.

BAB 2

KONFLIK SURIAH DAN FAO

Melalui bab ini, peneliti akan menguraikan FAO sebagai aktor, mulai dari latar belakang pembentukan hingga ruang lingkup kerja. Ini dimaksudkan untuk memperjelas posisi FAO dari dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berimplikasi secara global. Peneliti juga menjelaskan mengenai implikasi dari Covid-19 terhadap peran FAO secara global, di mana nantinya akan dikoneksikan kepada kondisi di Turki.

2.1 FAO Sebagai Aktor

Dalam konteks penelitian ini, FAO merupakan pilar penting yang berperan terhadap krisis pangan di Turki. Namun, sebelum menjelaskan secara detail, peneliti menjelaskan definisi dari FAO. Philip White, akademisi dari University of Leeds, menjelaskan bahwa setelah Perang Dingin, PBB sangat politik-sentris. Artinya, banyak dari program yang dijalankan olehnya terfokus pada perdamaian seperti *peace keeping* dan *Security Council*. PBB juga membentuk organisasi yang berfokus terhadap isu kemanusiaan seperti *the High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan *the World Food Programme* (WFP) yang berada di bawah naungan *the Office for Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) (White, 1999).

Seiring perkembangan waktu, agensi spesial dari PBB kurang mendapatkan atensi. Oleh karena itu, PBB membentuk FAO yang bertujuan sebagai badan yang berfokus kepada keamanan pangan hingga pengembangan terhadap pertanian. White (1999) menjelaskan bahwa meskipun berada di luar “klub” PBB, FAO tetap beroperasi dalam keadaan darurat dan menjadi penting karena Resolusi ECOSOC

tahun 1995 yang berisikan terhadap tugas untuk memberikan laporan dan bantuan kepada PBB (White 1999).

Melalui penjelasan singkat ini, bagian selanjutnya akan menjelaskan secara detail tugas dari FAO dan korelasinya dengan Covid-19.

2.2 FAO: Latar Belakang dan Ruang Lingkup

Pembentukan FAO didasari oleh inisiatif dari Presiden Franklin D. Roosevelt. Ia mendorong untuk menggelar konferensi di Hot Springs, Virginia, yang kemudian dikenal sebagai the United Nations Conference on Food and Agriculture. Dari pertemuan itu, ddi tahun 1945, FAO menggelar konferensi untuk pertama kali di Quebec, Kanada, sekaligus meresmikan FAO menjadi organisasi khusus dari PBB. Peresmian ini didukung oleh Australia, Belgia, Cina, dan 39 negara lainnya (FAO, 2020).

FAO berfungsi sebagai badan yang mengatasi masalah kelaparan dan kekurangan gizi di dunia. Alhasil, dengan negara yang bergabung ke dalamnya, mereka tidak hanya mendapatkan bantuan, namun dapat membagi ilmu mengenai mengatasi masalah tersebut yang tentu dapat menjadi perhatian semua negara. Melalui laman FAO, mereka memperhatikan secara serius isu tersebut, mengingat sejak dulu, manusia telah didorong secara natural untuk menemukan makanan secara mandiri. Satu di antaranya dengan bertani (FAO, 2020).

Namun, FAO merasakan kekhawatiran terhadap beberapa negara yang tidak mendapatkan sumber daya alam yang maksimal meskipun di satu sisi, banyak negara yang mampu menyediakan sumber daya alam yang cukup kepada rakyatnya. Oleh karena itu, dengan distribusi sumber daya yang minim, terjadi kemunculan

masalah seperti kekurangan gizi. Kinerja FAO dirangkai melalui program yang bersifat berkelanjutan di sektor pangan dan pertanian seperti pengelolaan sumber daya dan meningkatkan produktivitas pertanian di kalangan pedesaan (FAO, 2021).

Studi (Sihaloho, Prabowo and Kusuma 2022) memperlihatkan peran FAO dalam krisis pangan di Yaman (2015-2020). Melalui hasil temuannya, mereka menjelaskan bahwa ada tiga program FAO dalam merespons krisis: (1) membentuk Famine Prevention Plan (FRP); (2) membentuk Emergency Livelihoods Response Plan (ELRP) yang berfungsi sebagai cara untuk merestorasi infrastruktur di sektor pangan; (3) memperkuat koordinasi (Sihaloho, Prabowo and Kusuma 2022).

Sejalan dengan penelitian serupa, studi (Khairunnisa and Wibowo 2021) menganalisis peran FAO di Republik Afrika Tengah (2015-2017). Akibat dari konflik, FAO mencatat sekitar 2,5 juta jiwa terancam dalam masalah kelaparan, di mana 1,6 juta di antaranya berada di situasi krisis. Oleh karena itu, FAO berperan sebagai “jembatan” antara masyarakat dan pemerintah sebagai pemberi informasi. Selain itu, FAO berperan dalam pembangunan konservasi tanah dari penampungan air hujan hingga memfasilitasi perlengkapan pertanian kepada masyarakat (Khairunnisa and Wibowo 2021).

2.3 Korelasi Antara FAO dan Covid-19

Keberadaan Covid-19 membuat FAO memberikan respons. *World Health Organisations* (WTO) pada 11 Maret 2020 mengumumkan bahwa Covid-19 masuk ke kategori sebagai pandemi. Secara harfiah, pandemi berasal dari bahasa Yunani; “pan” berarti semua, dan “demos” berarti orang (Koestanto 2020). Ini dapat

diartikan sebagai epidemi yang menyebar dan berlaku kepada seluruh orang. Dalam konteks ini, semua benua menjadi korban kecuali benua antartika.

Per 23 Maret 2020, data *World Meter* menunjukkan bahwa 192 negara mengalami pandemi Covid-19, dengan total 337.553 orang, 98.884 orang sembuh, dan 14.654 orang meninggal. Cina adalah negara dengan tingkat jangkitan tertinggi, dengan Italia, AS, Spanyol, Jerman, dan Iran di belakangnya. Tingkat kematian COVID-19 di Italia mencapai lebih 8,2%, yang paling tinggi di dunia, dan saat ini Eropa adalah episentrum penyebaran virus (Worldometer, 2020).

Melalui laman resmi, FAO memberikan tanggapan dan juga menerapkan kebijakan alternatif untuk mengurangi dampak dari Covid-19. Dalam konteks ini, FAO lebih berfokus terhadap pangan. FAO menyatakan kesehatan harus menjadi fokus utama. Oleh karena itu, negara dapat meningkatkan pengujian (Covid-19) sebanyak mungkin dan menerapkan isolasi untuk memperlambat penyebaran (FAO, 2020). Selain itu, karena pandemi telah melumpuhkan ekonomi, negara harus membantu masyarakat yang paling rentan. Negara-negara dapat berusaha untuk memastikan pasokan pangan tetap mengalir dengan memberikan prioritas tertinggi kepada kesehatan.

Lebih dari 87% siswa di seluruh dunia terkena dampak dari penutupan sekolah. Hal ini telah diterapkan lebih dari 160 negara di seluruh dunia (de Oliveira Araújo, et al. 2020). Dalam artian, banyak siswa yang tidak dapat menerima makanan yang bernutrisi dari sekolah. Ini juga berdampak kepada “mereka” yang memiliki pekerjaan seperti menjadi pemasok katering makanan ke sekolah dan produsen makanan katering yang mengalami penurunan pendapatan. Menurut FAO (2020), untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga kehidupan selama

pemulihan, bantuan darurat dapat diberikan secepat mungkin. Dalam jangka panjang, negara-negara harus meningkatkan kesiapsiagaan darurat wabah di seluruh rantai pasokan makanan untuk mencegah penyakit menular dan efek gizi buruk terhadap kesehatan.

Bantuan tunai untuk rumah tangga yang rentan dapat mengurangi dampak krisis. Bantuan tunai dapat membantu keluarga sampai keadaan membaik, terutama ketika layanan sosial terdampak. Maka daripada itu, negara dapat meningkatkan layanan daring untuk memastikan bahwa setiap orang tidak memiliki kontak langsung, terutama menggunakan uang tunai; ini juga dapat digunakan ke dalam pembayaran pajak tahunan dan pembelian obat di apotek. Selama penyebaran Covid-19, misalnya, ini dilakukan oleh pemerintah Cina dengan menggunakan pembayaran digital dari Alipay (FAO, 2020). Selain itu, program perlindungan sosial harus diperluas untuk membantu kelompok rentan dan tidak memiliki perlindungan sebelumnya, termasuk orang lanjut usia.

Beberapa sektor pertanian juga berdampak dari penyebaran Covid-19, seperti pembelian bahan baku dari produk yang harus melalui sistem pasar. Hal ini pernah terjadi di Afrika pada tahun 2014, ketika rantai pertanian terganggu yang membuat kekurangan pangan dan harga mengalami kenaikan (FAO, 2020). Di Cina, masalah logistik dan kekurangan tenaga kerja telah menyebabkan kehilangan komoditas sayuran segar, ketersediaan pakan ternak yang terbatas, dan penurunan kapasitas rumah potong hewan.

FAO memberikan saran untuk negara langsung terlibat aktif dalam beberapa hal. Pertama, negara dapat mendekatkan “diri” ke kelompok petani kecil untuk mengurangi kebutuhan dari mobilitas. Kedua, negara dapat menerapkan sistem resi

gudang yang dapat digunakan oleh petani tanda terima untuk menerima pembayaran mereka. Ketiga, negara-negara harus melakukan hal ini mempercepat pengembangan *e-commerce* untuk petani kecil. Keempat, petani kecil harus memiliki akses terhadap pendanaan, sehingga mereka dapat terus berproduksi. Sejumlah negara, seperti Indonesia, memperkenalkan paket stimulus yang tidak memberikan insentif yang jelas bagi petani kecil. Petani membutuhkan bantuan tunai dan program jaring pengaman yang dapat meningkatkan produktivitas mereka. Bank harus menaikkan biaya pinjaman petani dan memperpanjang tenggat waktu pembayaran. Suntikan modal di sektor pertanian dapat membantu usaha pertanian kecil dan menengah untuk terus beroperasi. Dalam konteks ini, negara harus memenuhi kebutuhan dasar petani kecil dan rumah tangga pedesaan (FAO, 2020).

Bagi banyak anak di daerah pedesaan, penutupan sekolah berarti tidak memiliki akses terhadap makanan sehat. Bagi produsen, hal ini berarti hilangnya pendapatan. Maka daripada itu, pemerintah daerah harus mempertimbangkan alternatif lain selain makanan di sekolah, seperti pengiriman makanan ke rumah agar produsen tetap dapat bekerja dan anak-anak tetap mendapat gizi. Di sisi lain, negara-negara harus menerapkan langkah-langkah untuk menjamin keselamatan pekerja pertanian. Tenaga kesehatan profesional di lokasi dapat memastikan pekerja tidak sakit. Jika memungkinkan, pekerja harus di tes virus Covid-19. Negara-negara miskin dapat mencari pendanaan internasional untuk mendukung petani kecil mereka. Ada mekanisme pendanaan, seperti Program Pertanian dan Ketahanan Pangan Global, yang dibentuk setelah krisis pangan tahun 2007-2008 (FAO, 2021).

Kemudian, negara dapat menjaga rantai pasokan utama terutama pada komoditas. Menurut FAO, komoditas dalam aspek ini dapat dibagi menjadi dua: komoditas pokok (gandum, jagung, kedelai, hingga biji-bijian) dan komoditas yang bernilai tinggi (buah-buahan dan sayuran). Produksi komoditas pokok bersifat padat modal, dan masalah kekurangan tenaga kerja akibat pembatasan pergerakan akibat Covid-19 berdampak pada berkurangnya hasil produksi. Di lain hal, biaya logistik untuk mendistribusikan komoditas terkena dampaknya karena menghambat transportasi pangan antar kota, provinsi, wilayah, dan negara (FAO, 2020).

Sebaliknya, menurut FAO (2020) komoditas bernilai tinggi membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memproduksinya. Jadi para pekerja sangat terdampak ketika para pekerja sakit dan tidak dapat melakukan perjalanan karena *lockdown*. Hambatan logistik yang mengganggu rantai pasok pangan berdampak lebih besar pada komoditas bernilai tinggi karena mudah rusak. Rantai pasokan bernilai tinggi mencakup pabrik pengolahan makanan, yang juga padat karya. Saat ini, sebagian besar jalur penyortiran tidak mematuhi persyaratan jarak sosial. FAO memberikan contoh konkret yang ada di Rosario, Argentina mengenai hambatan terhadap rantai pasokan. Argentina merupakan salah satu negara di Amerika Latin yang menjadi pusat ekspor biji-bijian serta merupakan daerah produksi kedelai yang utama. Selain itu, Argentina adalah eksportir pakan ternak berbahan dasar kedelai terbesar di dunia. Untuk menghentikan penyebaran virus, puluhan pemerintah kota di dekat Rosario telah melarang truk biji-bijian masuk dan keluar kota. Banyak di antaranya menentang perintah pemerintah federal untuk membuka jalan karena alasan kesehatan. Akibatnya, kedelai tidak diangkut ke pabrik, yang berdampak pada ekspor kedelai yang dibutuhkan ternak. Hal serupa juga terjadi di Brasil, eksportir

utama komoditas pokok lainnya. Ada laporan bahwa hambatan logistik membahayakan rantai pasokan pangan. Pelabuhan besar seperti Santos di Brazil atau Rosario di Argentina akan ditutup secara internasional, dan ini akan membahayakan perdagangan global (FAO, 2020).

2.4 Konflik Suriah dan Dampak Terhadap Sektor Pangan

Pecahnya konflik Suriah sejak kepemimpinan Al-Assad, diakibatkan dari pengeluaran berbagai kebijakan yang dipandang tidak memperjuangkan nilai-nilai keadilan sosial bagi masyarakat Suriah (BBC 2023). Ketidakadilan yang dirasakan tidak hanya dalam aspek politik, melainkan juga berdampak pada aspek ekonomi dan sosial yang tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya (Al Jazeera 2018). Sebab, meski rezim Al-Assad melakukan liberalisasi ekonomi, kebijakan tersebut dilakukan untuk memperkaya jejaring elit yang berhubungan erat dengan rezim Assad (Joya 2012) (Hinnebusch 2018).

Selain menimbulkan banyak korban akibat tingginya tindakan kekerasan, penangkapan hingga pembunuhan terhadap para demonstran yang menolak rezim Assad, pemerintah Suriah juga memutus akses masyarakat Suriah terhadap pangan, obat-obatan, listrik hingga jaringan telepon. Hal ini sebagai respons untuk mencegah lebih meluasnya massa demonstrasi, serta untuk menutup informasi situasi konflik yang dialami masyarakat Suriah kepada pihak internasional demi menghindari kecaman dari pihak internasional terhadap tindakan pemerintah Suriah.

Situasi yang semakin tidak stabil, kemudian mendorong terbentuknya suatu kelompok radikal bernama *Free Syrian Army* (FSA). FSA hadir memiliki tujuan untuk menjatuhkan pemerintahan Suriah di bawah kepemimpinan presiden al Assad (Mhaissen, 2018). Konflik di Suriah menjadi semakin meningkat, ketika FSA mengangkat diskursus terkait perbedaan sektarian antara pemerintah dan sebagian besar demonstran (Phillips 2015). Melalui diskursus sektarian, dapat diidentifikasi bahwa sebagian masyarakat dan demonstran memiliki kepercayaan atau menganut mazhab Muslim Sunni. Sementara itu, pemerintah Suriah termasuk Al Assad, menganut mazhab Alawi yang berstatus minoritas di Suriah. Perbedaan di antara kedua mazhab tersebut, sering kali menjadi faktor yang digunakan oleh masyarakat bermazhab Sunni untuk memobilisasi massa. Sebab dominasinya yang cukup besar di kalangan masyarakat.

Sementara itu, pemerintah Suriah memanfaatkan isu sektarianisme untuk menjaga monopoli kuasa pemerintahannya. Sekaligus, untuk menjustifikasi berbagai tindakan serta kebijakan yang dikeluarkan (Phillips 2015). Akibatnya, Suriah mengalami kondisi perang sipil antara dua kubu yaitu pemerintah Al Assad vs masyarakat Suriah. Konflik semakin ter-eskalasi ketika banyak dari pihak asing yang mulai memihak salah satu dari dua kubu tersebut. Seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa yang menyatakan kritiknya terhadap tindakan rezim al Assad dengan menuntut al Assad untuk turun dari kursi pemerintahan sejak Agustus 2011. Keberpihakan aktor internasional terhadap masyarakat Suriah yang pro-demokrasi semakin didukung oleh Qatar, Turki dan Arab Saudi yang berkoalisi membentuk "*Anti-Assad Bloc*" pada Agustus 2011 (William Young 2014). Dalam hal ini, Qatar memperkuat dukungannya terhadap

perlindungan masyarakat Suriah melalui pembentukan *National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces* pada November 2012. Di sisi lain, aliansi dari Suriah yaitu Iran dan Rusia telah secara berkelanjutan menunjukkan dukungannya terhadap rezim Al-Assad. Di antaranya dengan menyatakan veto terhadap resolusi dewan keamanan PBB terkait diturunkannya rezim Al-Assad pada Oktober 2011 (Britannica 2024).

Kompleksitas Perang Suriah juga diwarnai dengan keterlibatan AS. Dilansir dari lama Media Indonesia dan Kompas, Angkatan Bersenjata Suriah, wajib meninggalkan wilayah Suriah. Hal ini disebabkan karena AS telah melancarkan sejumlah serangan ke wilayah Suriah yang berbatasan dengan Irak. Terdapat tuduhan kepada AS oleh militer Suriah dengan memandang AS telah bekerja sama dengan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Menurut militer Suriah, kesempatan ini digunakan oleh para militer AS untuk melemahkan Suriah dalam melawan aksi terorisme.

Dari beberapa catatan, AS telah meledakkan bangunan atau infrastruktur yang ada di Bou Kamal dan Mayadeen, serta meluncurkan serangan ke Al-Qaem dan Akashat. Dalam hal ini, Presiden Biden bertanggung jawab atas serangan pesawat nirawak ke Tower 22, pangkalan militer AS di Yordania bagian timur laut. Tiga tentara Amerika Serikat tewas dan empat puluh personel militer terluka. Menurut keterangan militer AS, pesawat nirawak itu dibuat oleh Iran dan dioperasikan oleh kelompok milisi pendukung Iran yang berbasis di Irak. Pasukan AS telah berada di wilayah yang disebut Wilayah Keamanan Suriah Timur (ESSA) sejak 2015, menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak. Ada 900 karyawan. Di seberang perbatasan, di Irak, ada 2.500 prajurit AS yang bergabung

dalam operasi militer yang disebut *Inherent Resolve* (Tekad Kuat), di mana hal ini bertujuan untuk melawan NIIS. Di tahun 2023, lebih dari 4.360 orang telah terbunuh, termasuk kombatan dan masyarakat. Jumlah ini meningkat dari 3.825 orang pada tahun 2022, yang merupakan angka terendah setiap tahun sejak konflik dimulai pada 2011, ketika pemerintah menghentikan demonstrasi damai pro demokrasi.

Pada tahun 2018, *UN Humanitarian Agency* menyatakan bahwa satu juta penduduk yang menetap di Suriah, jauh atau bahkan tidak memiliki akses terhadap bantuan (Dajani Consulting 2019). Minimnya akses masyarakat terhadap hak-hak kebutuhan dasar manusia seperti makanan bergizi, air bersih hingga sanitasi yang layak, semakin memperparah situasi yang dialami oleh masyarakat Suriah. Terlebih, ketika Covid-19 menyebar ke seluruh dunia, Suriah sebagai salah satu wilayah konflik, memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi. Minimnya akses terhadap kesehatan, sulitnya jangkauan bantuan terhadap obat-obatan memperparah situasi yang dialami penduduk Suriah. Terdokumentasi ada sebanyak 50.000 kasus Covid-19 dengan persentase kematian sebesar 6% (Sarya Swed 2023).

Akibatnya, *The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) melaporkan bahwa sejak Maret 2011 - Maret 2021, sebanyak 306,887 warga sipil tewas akibat konflik maupun akibat minimnya akses terhadap kebutuhan dasar (Farge 2022). Sementara, 55.000 warga sipil diperkirakan tewas akibat penyiksaan di penjara oleh pihak pemerintah Suriah. Sekitar 27.126 diantara korban perang tersebut merupakan anak-anak. Per-Maret 2023, *Syrian Observatory for Human Rights* (SOHR) mendokumentasikan angka

kematian menjadi sebanyak 503,064. SOHR juga mengestimasi angka kematian yang sebenarnya lebih tinggi, yakni pada angka 613,400. Diperkirakan sekitar 2 juta penduduk Suriah telah berhenti sekolah, sementara 1,6 juta lainnya terancam keluar dari sekolah (Farge 2022).

Pada awal konflik di tahun 2011, sektor agrikultur Suriah menguasai hingga 40% ketenagakerjaan nasional. Namun, situasi konflik yang memanas dan Covid-19 pada tahun 2019 terus memperparah kondisi keamanan masyarakat Suriah, terutama keamanan pangan. Hal ini menyebabkan menurunnya produksi produk agrikultur, sehingga Suriah yang awalnya menggantungkan kegiatan ekonomi melalui produk agrikultur justru bergantung kepada impor pangan melalui bantuan kemanusiaan. Pertengahan tahun 2015, PBB melaporkan bahwa terdapat sekitar 10 juta penduduk Suriah mengalami ancaman keamanan pangan (Britannica 2024). 7 juta diantaranya merupakan penduduk yang tidak dapat bertahan tanpa bantuan pangan dari asistensi kemanusiaan, atau dapat dikategorikan mengalami krisis pangan akut.

Menanggapi fenomena tersebut, FAO mendistribusikan berbagai produk agrikultur seperti benih gandum dan barley, serta berbagai benih sayuran lainnya. Namun, pada November 2016, kapasitas panen produk agrikultur 55% lebih rendah dibandingkan produksi panen sebelum konflik. FAO mengkaji bahwa penurunan produksi panen ini terjadi karena petani tidak dapat mengakses pupuk dan produk pendamping produk agrikultur lainnya akibat inflasi, sementara, bantuan yang diberikan hanya berupa benih tanaman. Sehingga sektor pangan mandiri Suriah tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama pasca pecahnya konflik.

Terlebih, ketika terjadi gempa bumi pada 6 Februari 2023 di wilayah perbatasan antara Turki dan Suriah, sekitar 8,8 juta penduduk mengalami putusnya akses terhadap makanan, air dan tempat tinggal karena kerusakan infrastruktur akibat gempa. Kondisi ini semakin diperparah sebab pada saat terjadinya gempa, Suriah sedang mengalami inflasi akibat krisis global perang di Ukraina yang menyebabkan tingginya harga makanan dan bahan bakar di Suriah. Hal ini berdampak pada penurunan situasi ekonomi sebagaimana yang dilaporkan oleh World Bank. Tahun 2023, aktivitas ekonomi Suriah mengalami penurunan sebesar 1,2% per tahun akibat melemahnya aktivitas dagang. Selain itu, Suriah juga mengalami penurunan produksi minyak bumi sebesar 5,5% per tahun (World Bank 2024).

Sehingga, dilansir dari data per 2023, 22 juta populasi penduduk Suriah terpaksa keluar dari negaranya. 6,8 juta orang di antaranya dikategorikan sebagai *internally displaced people* (IDP) dimana lebih dari 2 juta orang terpaksa tinggal di tenda dengan akses terbatas terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. 6 juta penduduk lainnya merupakan pengungsi atau pencari suaka yang mencari perlindungan dari negara yang lebih aman, di antaranya seperti Turki, Lebanon, Yordania (Alexander Jung 2023).

BAB 3

APLIKASI TEORI PERAN TERHADAP FAO TERHADAP PENGUNGSI SURIAH DI TURKI AKIBAT DARI KONFLIK SURIAH

Melalui bab ini, peneliti menganalisis terkait dinamika konflik yang terjadi di Suriah, serta menganalisis berbagai dampak yang ditimbulkan akibat konflik yang terjadi. Terutama, dampaknya terhadap krisis pangan yang mendorong banyaknya masyarakat Suriah untuk mengungsi ke negara lain, khususnya di Turki. Selain itu, peneliti juga akan melakukan identifikasi terkait peran serta mekanisme FAO dalam membantu fenomena krisis pangan yang dialami pengungsi Suriah di Turki di masa pandemi Covid-19.

3.1 Urgensi FAO di Turki Masa Covid-19

FAO sejak awal menempatkan isu pangan sebagai prioritas global. Prinsip “*availability at all times of adequate world food supplies*” yang disepakati sejak 1974 memperlihatkan bahwa FAO memahami pangan bukan sekadar aspek ekonomi, melainkan bagian dari keamanan manusia (*human security*) (Shaw 2007). Pada masa Covid-19, urgensi ini semakin terlihat di Turki, di mana 41% pengungsi Suriah kehilangan pekerjaan, 18% terdampak pemutusan hubungan kerja massal, dan 12% tidak memiliki pekerjaan sama sekali (FAO 2020). Kondisi ini memperparah daya beli pangan dan meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi.

Komitmen ini dijaga di era Covid-19 terhadap para pengungsi Suriah di Turki. FAO melaporkan bahwa terdapat sekitar 41% pengungsi yang kehilangan pekerjaan akibat dari lembaga atau perusahaan yang berhenti beroperasi; 18% di

antara pengungsi menjadi korban dari pemberhentian massal; dan 12% di antaranya masih tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran massal dan Covid-19 juga ikut turut andil ke dalam peningkatan harga pangan karena daya beli yang turun. FAO melakukan beberapa kebijakan aktif dengan mencoba untuk memberi masukan melalui kampanye untuk menyadarkan para pengungsi untuk menjaga kesehatan. Ini juga dilakukan melalui koordinasi kepada pemerintah Turki untuk memprioritaskan kelompok yang rentan. Sektor pangan dan pertanian, yang menjadi fokus utama dari FAO, berdampak buruk di era Covid-19.

Komitmen ini juga mendorong FAO untuk menjaga stabilitas dalam penggunaan sektor pangan terhadap pengungsi Suriah di Turki. FAO, tentu, bekerja sama dengan pemerintah Turki mencoba untuk memenuhi hak-hak dasar yang dimiliki oleh pengungsi. Relasi antara FAO dan Turki tidak hanya memberikan pengetahuan hal-hal teknis, namun memiliki peluang dalam integrasi sosial dan ekonomi.

Jika di komparasikan sebelum kemunculan Covid-19, pengungsi Suriah berada di sekitar angka 3.5 juta. Angka ini terus meningkat di dalam periode 2020-2021. Menurut laporan dari FAO, jika dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, maka terdapat 54 laki-laki dan sisanya perempuan. Pengungsi Suriah ini, jika dibandingkan dengan penduduk Turki, maka terdapat sekitar 84 juta jiwa atau 4% dari total penduduk.

Keberadaan FAO di Turki tidak semua dirasakan oleh para pengungsi, salah satu di antaranya adalah dengan keterbatasan anggaran. Berdasarkan laporan dari *the Syrian Refugee Resilience Plan (SRRP)* menjelaskan bahwa pendanaan yang dikeluarkan dari 2020-2021 sebesar USD 111 juta (atau lebih

dari 1.8 triliun dalam rupiah). Dari dana tersebut, ditargetkan kurang lebih 300.000 orang mendapatkan bantuan dari 40% di antaranya adalah perempuan. Nilai atau norma yang dimaknai oleh FAO juga diimplementasikan kepada provinsi yang memiliki populasi pengungsi yang besar seperti Istanbul, Hatay, dan Gaziantep. Menurut data SRRP, pengungsi yang berada di wilayah tersebut sekitar lebih dari 400.000 jiwa (FAO 2020).

Melalui cara dan langkah yang dilakukan oleh FAO, terdapat beberapa pilar yang menjadi fokus FAO. Pertama, meningkatkan pengetahuan ketahanan pangan dan gizi. Kedua, menghidupkan sektor pertanian. Ketiga, meningkatkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Keempat, meningkatkan perlindungan sosial. Kelima, meningkatkan pengetahuan para pengungsi di sektor pangan dan pertanian.

Kompleksitas permasalahan pengungsi Suriah di Turki membuat FAO harus menyesuaikan kebijakan yang sesuai dengan situasi di lapangan. Namun, fokus atau tujuan akhir dari FAO adalah untuk menyelamatkan nyawa manusia, dalam konteks ini adalah pengungsi Suriah. Dalam jangka pendek, FAO berfokus terhadap memenuhi kebutuhan dasar pengungsi seperti makanan, air, tempat tinggal dan perawatan medis di masa Covid-19 (Revel 2020). Namun, pada masa jangka panjang, FAO berfokus ke dalam kapasitas ketahanan pangan. Hal ini bertujuan untuk mengharapkan bagi pengungsi dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa campur tangan FAO. Proses untuk mewujudkan kebijakan ini, FAO telah melakukan pengkajian terhadap pengungsi dan memberikan informasi seperti melalui pelatihan, sehingga masyarakat dapat kembali mendapatkan mata pencaharian.

Di masa Covid-19, berbagai pihak mencoba untuk berkoordinasi satu sama lain. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penanganan dan mengurangi risiko tidak tepat sasaran. Di Turki, para anggota dari FAO yang terletak di Turki, membuka kerja sama dengan para mitra lainnya seperti otoritas nasional, lokal, *Chambers of Agriculture, Chambers of Commerce*, akademisi, hingga organisasi sosial. Beberapa kerja sama lainnya seperti bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keamanan Buruh dan Sosial. Ini diperlukan untuk mengintegrasikan nilai di level sentral dan lokal (FAO 2022).

Oleh karena itu, di masa Covid-19, FAO merancang berbagai kebijakan utama. Pertama, membangun mengenai ketahanan pangan bagi para pengungsi untuk berpulang mendapatkan pekerjaan. Dibantu oleh Uni Eropa (UE) dan para mitra nasional FAO lainnya seperti Kementerian Pertanian dan Kehutanan (MoAF) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial (MoLSS), FAO memastikan untuk para pengungsi mendapatkan bantuan dalam mengintegrasikan sosio-ekonomi. Bekerja sama dengan Direktorat Pertanian dan Kehutanan di tingkat provinsi, FAO di Turki menyelenggarakan kursus pelatihan kejuruan di bidang produksi tanaman, peternakan dan pangan, termasuk produksi dan pengolahan daging, susu, buah dan sayuran, serta pembuatan roti (termasuk pelatihan kerja), dan menyediakan kursus bersertifikat bahasa Turki, memastikan tunjangan yang diperlukan. Berdasarkan laporan dari FAO tahun 2022, dari pelatihan ini terdapat sekitar 2.947 pengungsi Suriah yang terlibat (FAO 2022). FAO telah membuat pelatihan bagi 1.500 peserta mengenai *the Farmer Field School* (FFS). Secara persentase, 38,53% diisi oleh perempuan dan 4,60% dipenuhi oleh pengungsi (FAO 2022). Para peserta dibekali berbagai topik

berbeda termasuk produksi jeruk, peternakan, pembuatan kue, pistachio dan tomat, yang diajarkan oleh pelatih utama. Selain itu, para peserta menerima pelatihan mengenai prinsip-prinsip kesetaraan gender, teknik pertanian baru, dan praktik pertanian. FAO menyediakan paket input *Climate Smart Agriculture dan Good Agricultural Practices (CSA/GAP)* untuk mendukung sekolah lapangan petani. Sejumlah praktik baik disoroti di daerah seperti Hatay, dimana peserta FFS mengurangi penggunaan pestisida sebanyak hampir 30% serta berkontribusi pada peningkatan hasil panen kapas (FAO 2022).

Implementasi kebijakan FAO berlanjut ke kota Van, wilayah yang berbatasan langsung dengan Iran. Di wilayah tersebut, terdapat pelatihan yang dikhususkan kepada perempuan dalam bentuk pelatihan koperasi. FAO bekerja sama dengan pemerintah lokal kota Van guna meningkatkan dan mendorong efisiensi. Selama pelaksanaan program, pihak FAO juga mendorong FFS untuk berpartisipasi untuk mendirikan sektor kewirausahaan di wilayah tersebut. FAO memberikan *the Agricultural Skills Development Programme (ASDP)* kepada 1.473 peserta dengan 57% diantaranya adalah perempuan (World Vision). Dalam program tersebut, FAO berfokus terhadap rehabilitasi hutan melalui cara penghijauan kembali. Ini dipergunakan untuk meningkatkan kesadaran terutama kepada kelompok miskin untuk menstimulus ekonomi lokal. Di tahun 2018, FAO dengan bekerjasama dengan Jepang dan pemerintah Turki melaksanakan program tersebut di daerah Sanliurfa dan Kilis. Di tahun 2020, FAO bekerjasama dengan Jepang di wilayah Bursa, Izmir, dan Sanliurfa. Program yang didanai oleh Jepang ini berfokus kepada bisnis pertanian mikro dengan melibatkan 70 peserta yang bermayoritaskan perempuan rentan (FAO 2020).

Pihak FAO memberikan pelatihan mandiri untuk menciptakan kewirausahaan mikro. Selain bekerja sama dengan Jepang, FAO juga membuka komunikasi dengan Kementerian Pertanian dan Kehutanan untuk mengkoordinasi sekitar lebih dari 30 pengungsi untuk menciptakan usaha skala mikro di wilayah Bursa, Izmir, dan Sanliurfa. Proyek ini menawarkan pelatihan secara teoritis (di kelas) dan pelatihan di tempat kerja untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta mengenai produk pangan pertanian. Proyek ini juga menawarkan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan keterampilan bisnis pangan pertanian para peserta dan menyediakan peralatan dan perlengkapan penting untuk memulai usaha pertanian dan pertanian skala mikro.

Kedua, berfokus kepada praktik pelatihan yang ada di wilayah Adana dan Gaziantep. Berdasarkan laporan dari *Republic of Turkiye Presidency of Migration Management* di tahun 2022, dua wilayah tersebut berisikan banyak pengungsi dibandingkan wilayah lainnya seperti Izmir, Konya, Bursa, dan Kilis. Menurut data tersebut terdapat lebih dari 450 ribu pengungsi di wilayah Gaziantep dan lebih dari 250 ribu di wilayah Adana (FAO 2020). FAO bekerja sama dengan *Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)*, perusahaan Jerman. Selain berespons pandemi Covid-19, program FAO ini bertujuan untuk membentuk rancangan proyek sektor pertanian yang ditujukan untuk penguatan ketahanan, peningkatan lapangan kerja, dukungan mata pencaharian, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Berdasarkan temuan, proyek ini akan mengembangkan peta jalan untuk provinsi Adana dan Gaziantep yang dimana dapat meningkatkan kapasitas sektor

pertanian pangan, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, keamanan dan keamanan pangan, peningkatan lingkungan agribisnis dan akses pasar, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Program ini juga terjadi seperti di Mongolia. Di tengah Covid-19, FAO dan GIZ, bersamaan dengan Uni Eropa juga membuat *Sustainable Resilient Ecosystem and Agriculture Management in Mongolia*.

Pada kasus ini, meski pemerintah Turki telah banyak melaksanakan program-program yang membantu meningkatkan kesejahteraan pengungsi Suriah, Masih terdapat beberapa kendala, termasuk di antaranya penyediaan makanan bagi pengungsi terutama di saat pandemi Covid-19. Melalui kebijakan *Syrian Refugee Resilience Plan (SRRP)*, FAO bekerja sama dengan pemerintah Turki untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan dari pengungsi Suriah demi mendorong komunitas sosial dan ekonomi yang semakin terintegrasi. Hal ini dilakukan dengan memberikan dukungan terhadap kelompok pengungsi Suriah sebagai kelompok yang paling rentan, terutama bagi para pengungsi yang menggantungkan penghidupannya bekerja sebagai petani agrikultur. Pendampingan ini dilakukan oleh FAO berdasarkan lima pilar yang terdapat dalam SRRP, di antaranya melalui program kerja peningkatan ketahanan pangan hingga pengembangan pertanian berkelanjutan.

Keterlibatan FAO di Turki untuk pertama kali terjadi di tahun 1982. FAO membangun kantor secara resmi di Ankara, setelah Turki bergabung sebagai anggota FAO di tahun 1948, tepat tiga tahun setelah Perang Dunia II. Telah beragam program yang dijalankan oleh FAO di Turki sejak 2006, dan yang terbaru di tahun 2017 (FAO 2018). Bagi FAO, pangan dan pertanian merupakan

dua aspek yang esensial. Ini juga yang mendorong FAO untuk menciptakan lapangan kerja dan ketahanan pangan.

Di Turki, sektor pertanian didominasi oleh petani kecil. Menurut laporan dari FAO tahun 2020-2021, sebanyak 90% dari petani tersebut merupakan produsen dan sebagian besar diisi oleh perempuan. Dalam konteks ini, FAO mengklasifikasikan perempuan sebagai subjek yang rentan, mengingat keterbatasan keterampilan, kerja musiman, kendala bahasa, dan kekurangan layanan untuk penitipan anak. Ironisnya adalah ketika para perusahaan memerlukan pekerja dengan keterampilan tinggi. Maka daripada itu, bahasa seringkali menjadi hambatan budaya dalam proses perekrutan.

Di era Covid-19, pekerjaan di sektor pertanian menurun. Namun, sektor ini masih menyumbang 17,2% dari total lapangan kerja. Selain itu, penelitian terbaru oleh FAO menunjukkan bahwa permintaan akan tenaga kerja terampil masih tetap tinggi. Namun perlu digaris bawahi semakin banyak anggota masyarakat setempat yang meninggalkan pekerjaan pertanian, sementara semakin banyak SuTP dan Pemohon Perlindungan Internasional dan Pemegang Status (IPASH) yang memasuki sektor ini untuk memenuhi permintaan. Karena mayoritas masyarakat adalah sebagian besar SuTP dan IPASH hanya memiliki akses terhadap pekerjaan di sektor informal, mereka umumnya menerima upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan secara hukum, dan bergantung pada kesempatan kerja harian dan sementara.

Ketika mencari peluang kerja di sektor pangan dan pertanian, SuTP menghadapi tantangan-tantangan berikut seperti kekhawatiran akan hilangnya akses terhadap bantuan tunai yang disediakan oleh Jaring Pengaman Sosial

Darurat (ESSN) pemerintah, kendala bahasa Turki, tidak terdaftar dan hanya mempunyai akses terhadap pekerjaan sementara dengan upah rendah, kurangnya keterampilan, kurangnya pengetahuan tentang izin kerja. Maka daripada itu, banyak dari pengungsi yang mendirikan usaha pangan secara mandiri, dalam skala kecil dan besar. Namun, para petani tersebut menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya akses terhadap layanan perbankan, kurangnya aset produktif, dan kurangnya pemahaman tentang hak milik.

Di tahun 2020-2021, FAO menghadiri pertemuan untuk membahas mengenai *Regional Refugee and Resilience Plan (3RP)* (*Regional Refugee & Resilience Plan 2022*). Ini dilakukan untuk memperkuat kemitraan. Pertemuan-pertemuan ini dihadiri banyak oleh perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, PBB, mitra lokal dan perwakilan pemerintah. Program *Food Security and Agriculture (FSA)* secara rutin mengumpulkan data berdasarkan usia dan jenis kelamin para penerima manfaat proyek. Pada Desember 2021, mitra sektor FSA mencapai 7.064 orang, di mana 41% di antaranya merupakan laki-laki dan sisanya perempuan. Melalui program tersebut, terdapat sekitar 2.685 orang meningkatkan keterampilan gizi dan pengetahuan dasar pertanian; 1.883 orang meningkatkan keragaman pangan di tingkat rumah tangga; 2.078 orang meningkatkan kemandirian melalui lapangan kerja, pendapatan dan aset keuangan.

Hal ini memungkinkan respons dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan dan meningkatkan diskusi mengenai cara-cara berkelanjutan untuk secara efektif memenuhi kebutuhan SuTP dan komunitas di Turki. FAO juga berkontribusi pada Kelompok Kerja Mata Pencaharian dan Kelompok Kerja

Inisiatif Berbasis Uang Tunai di bawah 3RP, dan telah berhasil menjalin program bersama dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), UNHCR dan WFP. Pada tahun 2019, FSA melaksanakan rencana peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kerja sama dan kemitraan serta kapasitas mitra FSA.

FAO, dalam konteks ini, menjadi bagian dari pemerintah Turki untuk meningkatkan kapasitas sebagai negara yang memiliki motif kemanusiaan. Turki menjadi salah satu negara di Asia yang menerima keberadaan pengungsi Suriah (Suryantama 2021). Ini yang membuat Turki berbeda dari negara-negara lainnya. Di tahun 2016, dalam pergelaran the *World Humanitarian Summit*, Presiden Erdogan mengatakan, *“Turkey is a major actor in humanitarian aid by actively delivering aid to over 140 countries, with 6.4 billion dollars in aid and hosting over 3 million Syrian refugees. Our humanitarian aid has reached \$6.4 billion in 2014”*. Di lain hal, dalam pertemuan dengan NATO ke-62, *“We have been on the forefront of the Syrian crisis trying to find a solution. Similarly, we have self-sacrificed and hosted over 3 million refugees fleeing from the civil war.”*

3.2 Instrumen FAO dalam Menangani Krisis

Instrumen dalam teori peran merujuk pada seperangkat alat, mekanisme, serta strategi yang digunakan aktor untuk mewujudkan peran yang dijalankan di arena internasional. Dalam konteks FAO, instrumen menjadi sangat penting karena menentukan efektivitas organisasi dalam merespons krisis pengungsi Suriah di Turki, khususnya pada masa pandemi Covid-19. FAO tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bantuan teknis di sektor pertanian, tetapi juga sebagai aktor kemanusiaan

dan normatif yang mampu menghubungkan dimensi kebutuhan dasar, pemberdayaan jangka panjang, dan nilai-nilai keadilan sosial. Dengan kata lain, instrumen yang digunakan FAO bersifat multidimensional karena dirancang untuk mengatasi kebutuhan mendesak akibat pandemi sekaligus membangun fondasi ketahanan pangan berkelanjutan bagi pengungsi maupun masyarakat lokal.

Pertama, instrumen teknis menjadi salah satu pilar utama dalam upaya FAO. Melalui program *Farmer Field School (FFS)* dan *Agricultural Skills Development Programme (ASDP)*, FAO memberikan pendidikan dan pelatihan pertanian yang ditujukan langsung kepada pengungsi Suriah di Turki. Program ini tidak hanya fokus pada keterampilan dasar bercocok tanam, tetapi juga memperkenalkan pendekatan pertanian ramah lingkungan, efisiensi penggunaan sumber daya, hingga praktik *climate-smart agriculture*. Tujuan dari penggunaan instrumen teknis ini adalah agar para pengungsi tidak semata-mata bergantung pada bantuan kemanusiaan, melainkan dapat mengembangkan kemampuan produktif yang berkelanjutan. Dengan keterampilan pertanian modern yang diajarkan, para pengungsi memiliki peluang untuk mendapatkan pendapatan, memperbaiki kondisi gizi keluarga, sekaligus membangun rasa percaya diri dan kemandirian di tengah keterbatasan akses ekonomi yang mereka hadapi (FAO 2018). Instrumen teknis ini juga dirancang agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pengungsi, tetapi juga mendukung sistem pertanian lokal Turki melalui integrasi tenaga kerja baru yang terlatih.

Kedua, FAO menggunakan instrumen kemanusiaan yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak akibat pandemi Covid-19. Instrumen ini diwujudkan melalui distribusi bantuan pangan darurat, penyediaan bibit tanaman,

serta dukungan logistik bagi rumah tangga pengungsi yang terdampak krisis. Pada masa awal pandemi, banyak pengungsi kehilangan pekerjaan informal yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan utama, sehingga tingkat kerentanan terhadap kelaparan meningkat tajam. Melalui bantuan pangan darurat, FAO berupaya memastikan bahwa pengungsi tetap dapat memenuhi kebutuhan gizi dasar, sementara distribusi bibit dan pelatihan sederhana memberikan solusi yang lebih berorientasi pada jangka menengah. Dengan cara ini, FAO menerapkan pendekatan ganda, yaitu *relief* untuk mengatasi situasi darurat dan *development* untuk membangun kapasitas jangka panjang (Revel 2020). Pendekatan integratif ini menunjukkan bahwa FAO tidak berhenti pada logika karitatif, tetapi juga berusaha menciptakan keberlanjutan melalui pemberdayaan berbasis pangan.

Ketiga, FAO juga mengoperasikan instrumen normatif yang memperlihatkan peran organisasi internasional sebagai agen nilai. Instrumen normatif ini mencakup integrasi isu kesetaraan gender, perlindungan anak, serta promosi *climate-smart agriculture* dalam seluruh programnya. Misalnya, FAO memberikan perhatian khusus kepada perempuan pengungsi dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan pangan skala kecil. Langkah ini tidak hanya memberi peluang ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi sosial perempuan di dalam komunitas pengungsi yang sering kali rentan terhadap diskriminasi dan marginalisasi. Selain itu, promosi pertanian cerdas iklim menunjukkan bahwa FAO tidak hanya fokus pada krisis kemanusiaan jangka pendek, tetapi juga mengaitkan intervensinya dengan agenda global pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, instrumen normatif FAO berfungsi untuk memperluas cakrawala intervensi, dari sekadar teknis menjadi lebih politis dan moral, di mana isu-isu

keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan kelompok rentan menjadi bagian dari agenda utama (Barnett and Finnemore 2004).

Secara keseluruhan, ketiga instrumen tersebut menunjukkan bahwa peran FAO dalam menangani pengungsi Suriah di Turki tidak bersifat tunggal, melainkan multidimensi dan saling melengkapi. Instrumen teknis memungkinkan pengungsi memperoleh keterampilan produktif, instrumen kemanusiaan memastikan keberlangsungan hidup pada masa darurat, sementara instrumen normatif menanamkan nilai keadilan sosial dan keberlanjutan. Melalui kombinasi ketiganya, FAO berhasil menegaskan posisinya bukan hanya sebagai aktor teknis, tetapi juga sebagai agen normatif dalam tata kelola krisis internasional.

3.3 Arena Operasional FAO

Dalam teori peran, arena merujuk pada ruang interaksi yang menjadi wadah bagi aktor internasional untuk menjalankan perannya. Bagi FAO di Turki, arena operasionalnya terbagi ke dalam tiga level utama: internasional, nasional, dan lokal, yang saling berhubungan dan membentuk sebuah ekosistem kerja multilevel. Pertama, pada arena internasional, FAO berperan aktif dalam kerangka *Regional Refugee and Resilience Plan (3RP)*, sebuah inisiatif kolaboratif yang dipimpin oleh UNHCR dan UNDP serta melibatkan organisasi internasional lain seperti WFP, UNICEF, dan UN Women. Melalui arena ini, FAO tidak bekerja secara terisolasi, melainkan menjadi bagian dari koalisi global yang secara terpadu mendukung pengungsi Suriah dengan fokus pada sektor pangan, pertanian, dan mata pencaharian berkelanjutan. Arena internasional ini juga berfungsi sebagai wadah pembentukan norma, mobilisasi pendanaan, serta koordinasi strategi antar-lembaga

PBB agar tidak terjadi tumpang tindih program dan agar tercipta sinergi dalam merespons kebutuhan pengungsi (FAO 2020; UNHCR 2021).

Kedua, pada arena nasional, FAO bekerja sama erat dengan pemerintah Turki, khususnya melalui Kementerian Pertanian dan Kehutanan, untuk merancang dan mengimplementasikan program yang selaras dengan kebijakan nasional mengenai ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan. Kerja sama ini mencakup penyusunan kurikulum pelatihan, sertifikasi keterampilan pertanian, serta distribusi bibit unggul yang mendukung produksi pangan dalam negeri sekaligus memperkuat kapasitas pengungsi. Dari perspektif Turki, keberadaan FAO menjadi instrumen penting dalam berbagi beban, karena pemerintah tidak perlu menanggung seluruh biaya penanganan pengungsi, melainkan dapat mengandalkan dukungan teknis, finansial, dan keahlian dari FAO dan mitra internasional (Suryantama 2021). Arena nasional ini memperlihatkan bagaimana FAO menyesuaikan program global dengan konteks kebijakan domestik, sehingga intervensi yang dijalankan tidak hanya relevan bagi pengungsi, tetapi juga bermanfaat bagi pembangunan nasional Turki.

Ketiga, arena lokal menjadi titik paling nyata dari implementasi program FAO. Di tingkat desa dan komunitas, FAO melibatkan LSM lokal, otoritas pemerintah daerah, serta masyarakat setempat untuk melaksanakan program *Farmer Field Schools (FFS)* dan pelatihan keterampilan kerja. Arena ini menjadi wadah interaksi langsung antara pengungsi dan warga lokal, sehingga selain meningkatkan kapasitas pertanian, program juga berfungsi sebagai jembatan sosial yang mengurangi potensi konflik horizontal. Misalnya, dengan melibatkan warga lokal dalam pelatihan yang sama dengan pengungsi, manfaat program tidak hanya

dirasakan satu kelompok, tetapi menciptakan persepsi keadilan dan solidaritas di tingkat komunitas (FAO 2022). Dengan demikian, arena lokal memungkinkan FAO tidak hanya sekadar hadir sebagai lembaga internasional, tetapi benar-benar melebur dalam dinamika sosial masyarakat penerima manfaat.

Dengan kata lain, arena operasional FAO bersifat multilevel: arena internasional berfungsi sebagai ruang legitimasi, pendanaan, dan norma global; arena nasional menjadi ruang kebijakan dan koordinasi dengan pemerintah; sementara arena lokal menjadi ruang implementasi langsung dan integrasi sosial. Hubungan ketiga arena ini menunjukkan bahwa peran FAO dalam menangani pengungsi Suriah di Turki tidak hanya bergerak di satu level, melainkan merupakan bagian dari arsitektur global yang terhubung dari pusat ke akar rumput.

3.4 Pengambilan Keputusan FAO

Dalam teori peran, pengambilan keputusan merupakan proses bagaimana aktor internasional merumuskan strategi, menetapkan prioritas, serta menyesuaikan kebijakan dengan dinamika yang ada. FAO sebagai organisasi internasional menghadapi tantangan besar dalam merespons krisis pengungsi Suriah di Turki, khususnya di masa pandemi Covid-19. Keputusan yang diambil FAO tidak bersifat tunggal atau sepihak, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara kebutuhan pengungsi, kapasitas negara tuan rumah, norma internasional, dan keterbatasan sumber daya. Pada tahap awal, FAO menggunakan pendekatan berbasis data dengan melakukan *needs assessment* untuk memetakan kerentanan pangan dan potensi penghidupan pengungsi. Proses ini melibatkan survei rumah

tangga, konsultasi dengan komunitas, dan koordinasi dengan pemerintah Turki agar program yang dirancang benar-benar relevan dengan kondisi lokal (FAO 2020).

Selanjutnya, FAO menetapkan prioritas berdasarkan prinsip kemanusiaan dan keberlanjutan. Keputusan jangka pendek difokuskan pada distribusi bantuan pangan darurat dan bibit tanaman sebagai respons terhadap penurunan daya beli akibat pandemi. Sementara itu, keputusan jangka panjang diarahkan pada pembangunan kapasitas melalui pelatihan keterampilan pertanian, kewirausahaan, dan integrasi pengungsi dalam rantai nilai pertanian lokal. Dengan demikian, FAO menggabungkan keputusan *relief* (penyelamatan darurat) dengan *development* (pembangunan berkelanjutan), yang mencerminkan komitmen organisasi dalam membangun ketahanan jangka panjang, bukan sekadar solusi sementara (Revel 2020).

Dalam proses pengambilan keputusan, FAO juga menekankan prinsip inklusivitas dengan memberikan ruang bagi kelompok rentan, terutama perempuan dan pemuda, untuk dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi. Hal ini tercermin dari program pelatihan khusus yang ditujukan bagi perempuan pengungsi dalam kewirausahaan berbasis pangan dan pengolahan hasil pertanian. Keputusan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif karena menegaskan pentingnya kesetaraan gender dalam kebijakan pangan global (FAO 2021). Selain itu, FAO selalu berusaha memastikan bahwa setiap keputusan selaras dengan *Regional Refugee and Resilience Plan (3RP)* sehingga programnya terintegrasi dengan strategi lembaga internasional lain, menghindari tumpang tindih, dan memperkuat dampak kolektif (UNHCR 2021).

Terakhir, FAO menjalankan mekanisme evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan. Keputusan yang diambil tidak bersifat statis, melainkan selalu direvisi berdasarkan umpan balik dari lapangan, perubahan situasi pandemi, serta dinamika politik antara Turki dan mitra internasional. Proses ini menunjukkan bahwa FAO menggunakan model *adaptive decision-making*, yaitu keputusan yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan krisis. Dengan pendekatan ini, FAO tidak hanya tampil sebagai penyedia bantuan, melainkan sebagai aktor normatif dan teknis yang berkontribusi pada tata kelola krisis pengungsi di Turki.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Faktor-faktor seperti politik, militer, ekonomi, letak geografis, dan hubungan bilateral Turki mempengaruhi keputusan Turki untuk membuka pintu bagi pengungsi Suriah. Akibatnya, Turki terus menerapkan politik pintu terbuka, membangun lebih banyak kamp pengungsi, memberikan status kewarganegaraan, bekerja sama dengan organisasi internasional, dan memberikan insentif keuangan kepada pengungsi Suriah. Pada dasarnya, kebijakan pintu terbuka sejalan dengan kebijakan luar negeri Turki. Anggaran Turki yang dialokasikan kepada pengungsi sangat besar.

Jumlah pengungsi dari Suriah mencapai 5 juta dari tahun 2011 hingga 2018 dan tersebar di enam negara: Turki, Lebanon, Yordania, Irak, Mesir, dan Afrika Selatan. Ini menyebabkan banyak masalah yang dihadapi pengungsi Suriah di kamp pengungsian, salah satunya krisis pangan. Makanan yang dikonsumsi oleh para pengungsi tidak cukup secara kualitas dan kuantitas karena kemiskinan. Hal ini menyebabkan masalah kesehatan pada anak-anak yang dalam masa pertumbuhan, seperti kekurangan gizi yang berkelanjutan, yang terjadi pada 24% anak di bawah usia lima tahun yang tinggal di luar TAC. Terlebih, situasi pandemi Covid-19 semakin memperparah keadaan para pengungsi Suriah di Turki.

Menanggapi fenomena tersebut, FAO bekerja sama membantu pemerintah Turki untuk mengadakan berbagai pelatihan kepada para pengungsi Suriah. Berlandaskan pilar visi misinya, FAO membantu pengungsi Suriah di Turki dengan memfokuskan pada program kerja peningkatan pengetahuan terkait ketahanan

pangan dan gizi, hingga meningkatkan ketahanan pangan melalui pemberdayaan di sektor pertanian. FAO juga secara aktif menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Kehutanan untuk memberdayakan sekitar lebih dari 30 pengungsi dalam menciptakan usaha skala mikro di wilayah Bursa, İzmir, dan Sanliurfa. Berbagai program kerja tersebut telah secara bertahap diimplementasikan oleh FAO untuk tujuan jangka panjang. Sehingga, diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas para pengungsi dalam memenuhi hak-hak dasar, serta untuk menjaga stabilitas terutama pada sektor pangan demi tercapainya situasi sosial dan ekonomi yang terintegrasi bagi para pengungsi, baik pada dan pasca masa Covid-19.

4.2 Rekomendasi

Terdapat beberapa rekomendasi terkait penelitian selanjutnya, jika dianalisis berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dari bab 1 hingga bab 3. peneliti mengidentifikasi bahwa perlu ada evaluasi yang lebih komprehensif terhadap dampak jangka panjang dari berbagai program kerja yang dilakukan FAO terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan pengungsi Suriah di Turki, terutama setelah pandemi Covid-19. Hal ini penting untuk dikaji, sebab dapat membantu memahami efektivitas dan tantangan dari program kerja yang dilakukan FAO.

Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat melakukan analisis tentang sinergi antar FAO dengan pemerintah Turki dan aktor-aktor internasional lainnya. Analisis bentuk interaksi antar aktor dalam mempengaruhi perubahan kebijakan domestik menjadi penting, sebab dapat menawarkan model kerja sama yang dapat di replikasi pada wilayah lain. Terutama pada isu-isu mengenai urgensi peningkatan ketahanan

pangan dan upaya pengintegrasian kondisi sosial ekonomi bagi kelompok rentan di wilayah tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agestia, Ninda Rhetalola, Ayu Aruni, dan Novriest Umbu Walangara Nau. 2023. "The Implementation of Open Door Policy in Dealing with the Syrian Refugee Crisis (A Case Study of Turkey-European Union Cooperation Through the Emergency Social Safety Net Program 2016-2017)." *Journal of Middle East and Islamic Studies (MEIS)* 10 (1).
- Archer, Clive. 2001. *International Organizations*. Routledge.
- Al Jazeera. 2018. *Syria's war explained from the beginning*. Al Jazeera.
- Alexander Jung, Ezgi Irgil, Isabell Schierenbeck, Andrea Spehar. 2023. "Navigating through depoliticisation: international stakeholders and refugee reception in Jordan and Turkey." *Taylor & Francis Journals (Third World Quarterly)* 44 (5): 1021-1038.
- Amiruddin, M. Hasbi. 2021. *Erdogan; Tokoh Pemimpin Islam di Negara Sekuler*. LSAMA.
- Barnett, Michael, and Martha Finnemore. 2004. *Rules for the World: International Organizations in Global Politics*. Ithaca: Cornell University Press.
- Britannica. 2024. *Syrian Civil War*. 27 May. <https://www.britannica.com/event/Syrian-Civil-War>.
- BBC. 2023. *Why has the Syrian war lasted 12 years?* 2 May. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35806229>.
- Christophersen, Eirik. 2020. *These 10 countries receive the most refugees: 2010–2019*. NRC.
- Dajani Consulting. 2019. *Health Access and Utilization Survey: Access to Healthcare Services Among Syrian Refugees in Jordan-December 2018*. Dajani Consulting.
- de Oliveira Araújo, Francisco Jonathan Jonathan, Ligia Samara Abrantes de Lima, Pedro Ivo Martins Ivo Martins Cidade, Camila Bezerra Bezerra Nobre, dan Modesto Leite Leite Rolim Neto. 2020. "Impact Of Sars-Cov-2 And Its Reverberation In Global Higher Education And Mental Health." *Psychiatry Research* 288.
- FAO. 2018. *Drought characteristic and management in Central Asia and Turkey*. Food & Agriculture Org.
- FAO. 2020. *Syrian Refugee Resilience Plan*. FAO.
- FAO. 2020. *FAO and Japan support Syrian refugees and Turkish host communities in starting agribusinesses*. FAO. <https://www.fao.org/turkiye/news/detail-news/en/c/1301685/>.
- FAO. 2021. *FAO and the Response to COVID-19: Building Back Better for Food Security and Nutrition*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

- FAO. 2022. *Syrian Refugee Resilience Plan*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- FAO. t.thn. *FAO in Türkiye*. FAO. Diakses June 24, 2024. <https://www.fao.org/turkiye/fao-in-turkiye/en/>.
- Farge, Emma. 2022. *War has killed 1.5% of Syria's population: UN estimate*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/middle-east/syria-civilian-death-toll-over-306000-since-2011-un-2022-06-28/>.
- Hinnebusch, Raymond. 2018. "What went wrong: Understanding the trajectory of Syria's conflict." *From National Independence to Proxy War* (Springer international Publishing).
- IFRC. (2020). *Impact of COVID-19 on Refugees Living in Turkey*. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.
- Jamaan, Ahmad, dan Ade Irma Suriana Nasution. 2015. "Peran Food And Agriculture Organzation (FAO) dalam Mengatasi Krisis Pangan di Bangladesh Tahun 2007-2012." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* (urnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau) 2 (1).
- Jose. (2015). *The Syrian Conflict: Military Strength and Geopolitical Dynamics*. Middle East Review.
- Joya, Angela. 2012. "Syria and the Arab Spring: The Evolution of the Conflict and the Role of the Domestic and External Factors." *Ortadoğu Etütleri* 4 (1): 27-52.
- Khairunnisa, Ani, dan Christina Lisa Wibowo. 2021. "Peran FAO (Food and Agriculture Organization) dalam Upaya Menanggulangi Masalah Krisis Pangan di Republik Afrika Tengah Tahun 2015-2017." *Global Insight Journal* 6 (2).
- Koestanto, Benny D. 2020. "Pandemi" Ditetapkan sebagai Kata Pilihan Tahun 2020. Kompas.
- Lombardo, Clare. 2019. *More Than 300 Chemical Attacks Launched During Syrian Civil War, Study Says*. NPR.
- Munif, Yasser. 2020. "The Syrian Revolution: Between the Politics of Life and the Geopolitics of Death." (Pluto Press).
- NCBI. (2020). *Socio-Economic Impact of COVID-19 on Syrian Refugees in Turkey*. National Center for Biotechnology Information.
- Phillips, Christopher. 2015. "Sectarianism and Conflict in Syria." *Taylor & Francis (Third World Quarterly)* 36 (2): 357-376.
- Putri, Monalisa. 2021. "Peran Food and Agriculture Organization (FAO) dalam Menangani Krisis Pangan di Suriah." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 (8).
- Putra, Moody Rizqy Syailendra, Muhammad Fadloli, Tengku Amira Najla, dan Vannya Anastasya. 2024. "Peran Liputan Media Terhadap World Food

- Programme Dalam Menangani Krisis Pangan yang Terjadi di Suriah.” *Journal of Law Education and Business* 2 (2).
- Regional Refugee & Resilience Plan. 2022. *Turkey Country Chapter 2021-22*. Regional Refugee & Resilience Plan.
- Revel, Bastien. 2020. *Turkey’s Refugee Resilience: Expanding and Improving Solutions for the Economic Inclusion of Syrians in Turkey*. Atlantic Council, 5-16.
- Revel, Marius. 2020. “Humanitarian Relief and Development Nexus in Times of COVID-19: The Case of Food Security.” *Journal of Humanitarian Studies* 12 (3): 45–62.
- Rofii, M. Sya'roni. 2021. *Recep Tayyip Erdogan, Revolusi dalam Sunyi*. Ircisod .
- Sarya Swed, Mohammad B Almoshantaf, Weaam Ezzdean, Muhammad M Patwary, Sheikh Shoib. 2023. “Syria: A conflict-torn country and the COVID-19 conundrum.” *International Journal of Surgery* 109 (7): 2129-2130.
- Sihaloho, Rezya Agnesica Helena, Tri Bagus Prabowo, dan Roby Panji Kusuma. 2022. “Food Crisis in Yemen The Roles of Food and Agriculture Organization (FAO) from 2015 to 2020.” *Multilateral Governance and Global Civil Society* 5 (1).
- Starr, Stephen. 2012. *Revolt in Syria: Eye-Witness to the Uprising*. Hurst.
- Suryantama, Muhammad Dary. 2021. “Turkey’s Open-Door Policy for Syrian Refugees: Humanity Motive and Political Motive.” *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* 2 (2): 62-70.
- Suryantama, Bayu. 2021. “Turkey’s Refugee Policy and the Role of International Organizations.” *Journal of International Relations* 9 (2): 112–30.
- Tjarsono, Idjang Tjarsono, dan Ruli Prastio. 2014. “Peran Food And Agriculture Organization (FAO) dalam Membantu Krisis Pangan di Afghanistan (2007-2011).” *urnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 1 (1).
- UNHCR. 2021. *Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) Annual Report 2020–2021*. Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees.
- UNHCR. t.thn. *Refugees and Asylum Seekers in Türkiye*. Diakses November 24, 2024. <https://www.unhcr.org/tr/en/kime-yardim-ediyoruz/refugees-and-asylum-seekers-tuerkiye>.
- White, Philip . 1999. “The Role of UN Specialised Agencies in Complex Emergencies: A Case Study of FAO.” *Third World Quarterly* 20 (1): 223-238.
- WFP. (2021). *Assessing the Impact of the COVID-19 Pandemic on Refugees in Turkey*. World Food Programme.

- WFP. 2024. *WFP at a Glance A guide to the facts, figures and frontline work of the World Food Programme*. 10 December. <https://www.wfp.org/stories/wfp-glance>.
- W.Leshch, David. 2005. "The New Lion of Damascus: Bashar al-Asad and Modern Syria." (Yale University Press).
- Wikipedia. (2025). *Syrian Refugees in Turkey*. Retrieved from <https://en.wikipedia.org/>
- William Young, David Stebbins, Bryan A. Frederick, Omar Al-Shahery. 2014. "Spillover from the Conflict in Syria: An Assessment of the Factors that Aid and Impede the Spread of Violence." *Rand Corporation* 15-24.
- World Bank. 2024. *Syria: Growth Contraction Deepens and the Welfare of Syrian Households Deteriorates*. 24 May. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/05/24/syria-growth-contraction-deepens-and-the-welfare-of-syrian-households-deteriorates>.
- World Bank. 2021. *10 Years On, Turkey Continues Its Support for an Ever-Growing Number of Syrian Refugees*. 22 June. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/06/22/10-years-on-turkey-continues-its-support-for-an-ever-growing-number-of-syrian-refugees>.
- Worldometer. 2020. "COVID-19 Coronavirus Pandemic." Accessed March 23, 2020. <https://www.worldometers.info/coronavirus/>
- World Vision. t.thn. *Syrian refugee crisis: Facts, FAQs, and how to help*. Diakses February 16, 2024. <https://www.worldvision.org/refugees-news-stories/syrian-refugee-crisis-facts>.